



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RADEN RARA UTAMI RAHAJENG
2. Jabatan : KEPALA UNIT
3. NHK : 218019

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/76 m² di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 234.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, WARISAN Rp. 5.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA JEEP Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI BINTER MERZY Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOTOR, HONDA WIN MCB Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOTOR, HONDA NON MATIC Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. LAINNYA, 3SIXTY SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.598.500

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.138.163.566



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.493.762.066
III. HUTANG	Rp.	402.619.881
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.091.142.185

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.